

TRANSFORMASI DARI FRAGMENTASI KE INTEGRASI: SINERGI OPD DALAM PEMUTAKHIRAN DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA MALANG

Ike Zhiana Huzaini¹, Hirshi Anadza², Langgeng Rachmatullah Putra³
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas
Islam Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia
Email: ikezhianahuzaini29@gmail.com

ABSTRAK

Fragmentasi data kesejahteraan sosial antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi tantangan krusial dalam mewujudkan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi dari fragmentasi menuju integrasi data melalui sinergi OPD dalam implementasi PDKTSAM Reborn di Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teori *Intergovernmental Relations* milik Wright (1978). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari Bappeda, Diskominfo, Dinas Sosial P3AP2KB, dan BPS Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya transformasi menuju sistem data terintegrasi yang ditandai dengan pembagian peran yang jelas, komunikasi berkelanjutan, serta tata kelola kolaboratif. Implementasi PDKTSAM Reborn menunjukkan capaian entry data sebesar 98,30% dengan tingkat validasi 97,75%, serta mampu menekan duplikasi data hingga 2,04%. Selain itu, sistem ini menghasilkan rujukan tunggal data kesejahteraan sosial yang mendukung integrasi perencanaan anggaran lintas OPD dan penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model sinergi berbasis *Intergovernmental Relations* serta kontribusi praktis sebagai referensi implementasi integrasi data di tingkat daerah.

Kata Kunci: Fragmentasi Data; Integrasi Sistem; Sinergi OPD; PDKTSAM Reborn; *Intergovernmental Relations*; Kesejahteraan Sosial.

Pendahuluan

Kesejahteraan sosial merupakan elemen penting dalam pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program perlindungan sosial. Keberhasilan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sangat bergantung pada ketepatan data penerima manfaat (Hastuti dkk., 2024). Oleh karena itu, akurasi data menjadi faktor krusial agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran (Smeru Research Institute, 2023). Dalam praktiknya, kualitas data tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan data (Santoso dkk., 2023).

Pentingnya integrasi data ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang mendorong penggunaan data Tunggal dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran, duplikasi data, serta lemahnya koordinasi antar lembaga (Ombudsman Republik Indonesia, 2024). Selain itu, keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya sinergi pusat dan daerah turut menghambat pemutakhiran data (Ariansyah dkk., 2025).

Upaya perbaikan dilakukan melalui penerapan Sistem Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) untuk mendorong integrasi data lintas sektor. Namun, implementasi di daerah masih terkendala oleh koordinasi yang lemah, ego sektoral (Nuryana & Junaidi, 2025), serta keterbatasan pendanaan (Azizah & Permana, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik di daerah.

Sebagai respons, Pemerintah Kota Malang mengembangkan PDKTSAM Reborn sebagai sistem pendataan kesejahteraan sosial terintegrasi melalui sinergi Bappeda, Diskominfo, Dinsos P3AP2KB, dan BPS. Sistem ini dilengkapi fitur berbasis identitas dan kebutuhan untuk meningkatkan akurasi data (Palumpun, 2024). Implementasinya menunjukkan capaian entry data sebesar 98,30% dan validasi 97,75% (Palumpun, 2024). Meskipun demikian, masih ditemukan data ganda dan ketidakakuratan yang menegaskan pentingnya penguatan sinergi kelembagaan.

Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek teknis sistem dan evaluasi kebijakan, sehingga dinamika sinergi antar OPD belum banyak dikaji, serta adanya perubahan kebijakan nasional dari DTKS

menjadi DTSEN turut menambah tantangan tersendiri terhadap sinergi pemutakhiran data kesejahteraan sosial karena membutuhkan penyesuaian terhadap pola sinergi yang telah berjalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi Pemerintah Kota Malang dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial melalui PDKTSAM Reborn dengan menggunakan pendekatan *Intergovernmental Relations* dari Wright (1978) untuk memahami pola koordinasi dan dinamika kelembagaan lintas OPD.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergi antar OPD dalam proses pemutakhiran data kesejahteraan sosial melalui PDKTSAM Reborn di Kota Malang, dengan menggunakan pendekatan *Intergovernmental Relations* untuk mengidentifikasi pola koordinasi, pembagian peran, mekanisme komunikasi, serta dinamika kelembagaan dalam mendukung integrasi data.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman dalam kajian *Intergovernmental Relations*, khususnya terkait sinergi antar OPD dalam pengelolaan serta integrasi data kesejahteraan sosial di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini mengungkap dinamika kelembagaan, pola koordinasi, dan mekanisme komunikasi lintas sektor yang berperan dalam mendukung tata kelola data kolaboratif di era transformasi digital pemerintahan.

Dari sisi praktis, penelitian ini menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan sinergi antar OPD, terutama dalam proses pemutakhiran dan integrasi data kesejahteraan sosial. Hasil penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan implementasi PDKTSAM Reborn, sekaligus dapat dijadikan contoh praktik baik dalam pengelolaan sistem data terintegrasi guna menunjang perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Tinjauan Pustaka

Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas perangkat lunak, perangkat keras, serta sumber daya manusia yang saling terintegrasi dalam proses pengolahan data menjadi informasi yang bernilai (Pertama, 2019). Kualitas informasi yang dihasilkan oleh SIM menurut (McLeod, 2001) ditentukan oleh empat dimensi utama yaitu, relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Selain itu, SIM berperan penting dalam mendukung fungsi manajerial, khususnya dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian (Helmawati, 2015).

Digital Governance

Pendekatan ini merujuk pada pengelolaan organisasi yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, baik dalam proses administrasi, pengambilan keputusan, maupun penyelenggaraan pelayanan publik (Privy, 2024). Welchman (2015) mengemukakan bahwa terdapat tiga indikator utama, yaitu strategi digital, kebijakan digital, dan standar digital. Selain itu, konsep ini merupakan pengembangan dari *e-governance* yang tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan berbasis teknologi, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola yang lebih interaktif dan partisipatif (Milakovich, 2014).

Intergovernmental Relations

Intergovernmental Relations (IGR) merupakan konsep teoritis yang menjelaskan kompleksitas hubungan kerja sama antar berbagai tingkat dan unit pemerintahan, baik dalam sistem federal maupun desentralisasi. Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh Deil S. Wright pada tahun 1978 sebagai respons terhadap semakin kompleksnya struktur pemerintahan modern yang menuntut adanya koordinasi lintas sektor dan tingkatan.

(Wright, 1978) mendefinisikan IGR sebagai suatu sistem yang bersifat universal dalam suatu negara, di mana para aktor pemerintahan terlibat dalam kerja sama dan koordinasi, baik secara vertikal (antara tingkat pemerintahan yang berbeda) maupun horizontal (antar pemerintah pada tingkat yang setara), dengan keterkaitan yang erat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa pemerintah modern tidak lagi dapat berjalan secara terpisah, melainkan membutuhkan integrasi dan sinergi untuk mencapai tujuan bersama.

Lebih lanjut, (Wright, 1978) mengidentifikasi lima dimensi utama dalam implementasi IGR. Pertama, *the roles of government* yang menekankan kejelasan peran dan kontribusi setiap Tingkat pemerintahan dalam kolaborasi, termasuk pembagian tanggung jawab, kesepakatan bersama, dan penetapan tujuan kolektif. Kedua, *the interaction of public officials* yang menyoroti pentingnya interaksi antar pejabat publik dalam membangun kepercayaan, kesamaan persepsi, dan pemahaman prosedural. Ketiga, *sustainability communication* yang menekankan pentingnya komunikasi yang berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan untuk mendukung

koordinasi jangka Panjang. Keempat, *the roles of administrator* yang menekankan peran administrator sebagai koordinator, mediator, dan fasilitator dalam hubungan antar pemerintah, termasuk dalam aspek manajemen dan pengambilan keputusan. Kelima, *focus attention on the policy* yang menekankan bahwa kerja sama antar pemerintah harus berorientasi pada pencapaian hasil kebijakan yang konkret, seperti dalam penganggaran, penentuan prioritas program, dan koordinasi pembiayaan.

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, IGR menjadi sangat relevan seiring dengan penerapan desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada daerah, namun tetap memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta sinkronisasi antar pemangku daerah. Penerapan IGR juga dinilai penting untuk mengatasi kompleksitas pengelolaan urusan pemerintahan yang semakin berkembang (Jazuli & Eprilianto, 2024).

Sinergi

Sinergi dapat dipahami sebagai bentuk hubungan komunikasi yang berada pada tingkat tinggi, yang terbentuk melalui integrasi serta kerja sama yang kuat antar individu maupun lembaga (Rakamdani & Adiando, 2019). Sinergi antar pemangku kepentingan dapat dianalisis melalui dua aspek utama yaitu komunikasi dan koordinasi (Milhan, 2011). Dalam konteks komunikasi, terdapat lima kriteria yang menjadi ukuran, yakni *numerical, channel, goal, feedback*, dan *relationship type* (Mukarom, 2020). Sementara itu, aspek koordinasi mencakup empat kriteria, yaitu kesepakatan, komitmen, kompetensi, kesadaran, serta kontinuitas (Aprilianto, 2016).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sinergi antar OPD dalam proses pemutakhiran data kesejahteraan sosial. Lokasi penelitian mencakup empat instansi yang berlokasi di Kota Malang, yaitu Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial P3AP2KB, dan BPS Kota Malang. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan empat pejabat yang memiliki keterlibatan langsung dalam program PDKTSAM Reborn, yaitu Penelaah Teknis Kebijakan Bappeda, Statisi Ahli Pertama Diskominfo, Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial P3AP2KB, serta Ketua Tim Statistik Sosial BPS Kota Malang.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu, observasi partisipatif dalam kegiatan rapat koordinasi antar OPD, wawancara mendalam semi terstruktur yang dilaksanakan pada periode 29 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026, serta studi dokumentasi yang meliputi laporan resmi, Surat Keputusan Wali Kota, dan dokumen perencanaan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang mencakup empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles dkk., 2014). Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi Teknik, dan *member check*.

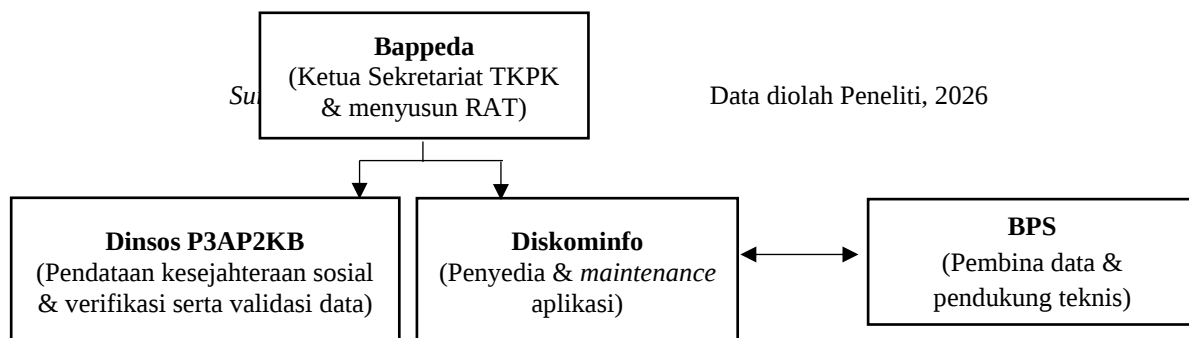
Sedangkan kerangka analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori IGR yang dikemukakan oleh (Wright, 1978), dengan lima indikator utama yakni, *the roles of government, the interacton of public officials, sustainability communication, the roles of administrator*, dan *focus attention on the policy*.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah (*The Roles of Government*)

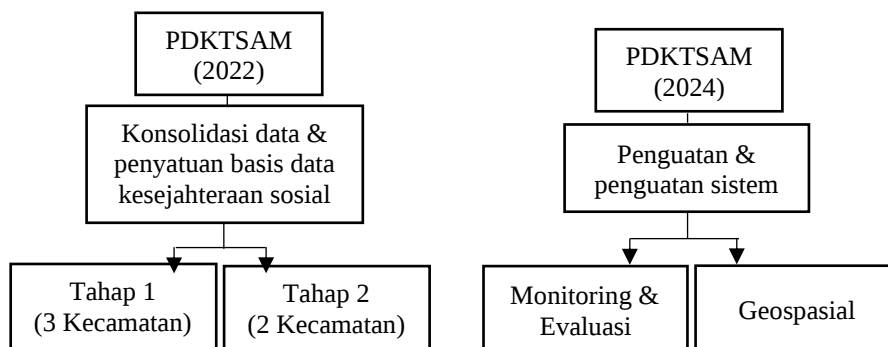
Indikator pertama dalam IGR menurut (Wright, 1978) menekankan urgensi kejelasan peran dan tanggung jawab setiap aktor dalam mencapai tujuan bersama. Dalam implementasi PDKTSAM Reborn, sinergi antar OPD dibangun di atas fondasi kelembagaan yang kuat melalui Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 100.3.3.3/136/35.73.112/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) beserta sekretariatnya untuk periode 2025-2029.

Bagan 1. Kerangka Pembagian Peran dan Koordinasi antar OPD



Mengacu pada regulasi tersebut, terbentuk pembagian peran yang proporsional dan saling melengkapi antar instansi. Bappeda Kota Malang berperan sebagai Ketua Sekretariat TKPK yang mengemban fungsi koordinasi perencanaan serta pengarah kebijakan melalui penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT). Diskominfo bertanggung jawab dalam penyediaan, pengembangan, serta pemeliharaan infrastruktur digital dan sistem aplikasi PDKTSAM Reborn. Sementara itu, Dinas Sosial P3AP2KB menjalankan peran sebagai pelaksana teknis utama yang mencakup kegiatan pendataan lapangan, verifikasi, dan validasi data melalui tenaga kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan. Adapun BPS Kota Malang berfungsi sebagai pembina metodologis yang memastikan kualitas indikator serta standar data statistik yang digunakan.

Bagan 2. Perbandingan PDKTSAM & PDKTSAM Reborn



Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Konfigurasi pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa setiap aktor menjalankan tugas sesuai dengan kompetensinya tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan, namun tetap terintegrasi dalam pencapaian tujuan bersama, yaitu pemutakhiran data kesejahteraan sosial yang akurat dan terpadu. Temuan ini selaras dengan prinsip IGR yang menekankan bahwa efektivitas hubungan antar lembaga pemerintah ditentukan oleh kejelasan peran, komitmen kolektif, serta kesepakatan tujuan yang terinstitusionalisasi ((Wright, 1978). Selain itu, PDKTSAM Reborn menunjukkan perkembangan yang signifikan, dari sekedar sistem pendataan dasar pada tahun 2022 menjadi instrumen monitoring dan evaluasi berbasis geospasial pada tahun 2024, yang mencerminkan penguatan peran kolaboratif antar OPD secara berkelanjutan.

Interaksi Pejabat Publik (*The Interaction of Public Officials*)

Indikator kedua dalam perspektif IGR menurut (Wright, 1978) menegaskan bahwa efektivitas sinergi tidak semata ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kualitas interaksi informal antar pejabat publik, seperti tingkat kepercayaan, kesamaan persepsi, serta kejelasan prosedur kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antar pejabat lintas OPD dalam pelaksanaan PDKTSAM Reborn berlangsung secara intensif, baik melalui mekanisme formal maupun informal.

Interaksi formal diwujudkan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi lintas OPD yang dilaksanakan secara berkala dalam forum TKPK, pelatihan bersama bagi petugas pendataan, serta forum teknis yang melibatkan Diskominfo, Bappeda, dan Dinsos P3AP2KB. Disisi lain, interaksi informal terbangun melalui komunikasi langsung antar pejabat dalam merespons berbagai isu teknis operasional, yang secara bertahap memperkuat kepercayaan antar kelembagaan.

Tingkat kepercayaan tersebut tercermin dari pengakuan masing-masing instansi terhadap legitimasi dan kapasitas institusi lain. Diskominfo mengakui peran strategis Bappeda dan Dinsos P3AP2KB dalam pengambilan kebijakan, sementara BPS diposisikan sebagai rujukan utama dalam aspek metodologis. Selain itu, kesamaan persepsi mengenai pentingnya integrasi data kesejahteraan sosial sebagai dasar perumusan kebijakan turut menjadi faktor pengikat dalam interaksi tersebut. Temuan ini sejalan dengan pandangan Wright (1978) yang menekankan bahwa kualitas interaksi antar pejabat publik merupakan fondasi utama dalam membangun sinergi kelembagaan yang efektif.

Komunikasi Berkelanjutan (*Sustainability Communication*)

Dalam perspektif IGR, Wright (1978) menekankan bahwa efektivitas hubungan antar pemerintah tidak cukup ditopang oleh komunikasi yang bersifat insidental, tetapi memerlukan keberlanjutan komunikasi yang konsisten, berulang, dan membentuk pola koordinasi jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar OPD dalam implementasi PDKTSAM Reborn berlangsung melalui berbagai saluran yang saling terintegrasi. Secara formal, komunikasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi rutin dalam forum TKPK yang membahas perkembangan program, penanganan data ganda, penyelesaian kendala teknis, serta sinkronisasi kebijakan. Dalam hal ini, Bappeda berperan aktif mengoordinasikan OPD secara periodik, khususnya dalam

proses perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, Diskominfo menjaga keberlanjutan komunikasi teknis dengan Bappeda dan Dinas Sosial, mulai dari tahap perancangan sistem hingga evaluasi implementasi.

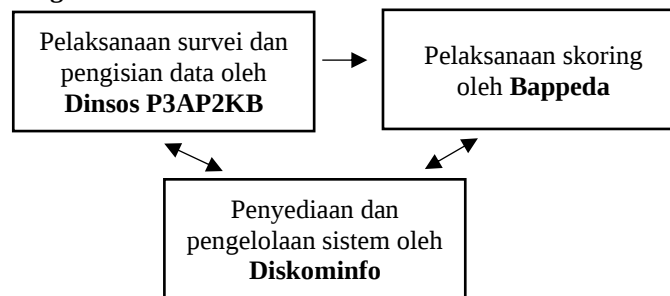
Selain komunikasi horizontal antar OPD, terdapat pula komunikasi vertikal yang terjalin antara Pemerintah Kota Malang dengan BPS terkait akses data DTSEN dan penerapan metodologi statistik, serta dengan Kementerian Sosial melalui sistem SIKS-NG. Lebih lanjut, transformasi digital turut memperkuat keberlanjutan komunikasi melalui pemanfaatan aplikasi PDKTSAM Reborn sebagai media koordinasi operasional sehari-hari, sehingga mengurangi ketergantungan pada pertemuan tatap muka.

Pola komunikasi yang terintegrasi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi tidak lagi bersifat reaktif terhadap permasalahan, melainkan telah menjadi bagian dari siklus kerja yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Wright (1978) yang menegaskan bahwa komunikasi yang berkesinambungan merupakan prasyarat utama bagi terciptanya hubungan antar pemerintahan yang efektif.

Peran Administrator (*The Roles of Administrator*)

Berbeda dengan indikator sebelumnya, indikator keempat dalam kerangka IGR menempatkan administrator publik tidak hanya sebagai pelaksana tugas individual, tetapi juga sebagai aktor yang menjalankan fungsi pengaturan, administrasi, dan manajemen program secara kolaboratif. Perspektif ini sebagaimana dikemukakan oleh Wright (1978). Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data dalam PDKTSAM Reborn dilaksanakan melalui sistem tata kelola administratif yang bersifat terdistribusi namun tetap terintegrasi. Pada dimensi pengaturan, sebelum pelaksanaan kegiatan pendataan, Bappeda melakukan koordinasi awal dengan BPS untuk menyepakati definisi operasional, indikator, serta kriteria kemiskinan yang akan digunakan sebagai acuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa standar kerja dibentuk melalui kesepakatan kolektif, bukan ditentukan secara sepihak oleh satu instansi.

Bagan 1. Alur Administrasi dalam Proses Pemutakhiran Data



Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Pada dimensi administrasi, pembagian tugas dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD. Dinas Sosial P3AP2KB bertanggung jawab atas pelaksanaan pendataan lapangan melalui tenaga kesejahteraan sosial, Bappeda melakukan pengolahan serta skoring data, sedangkan Diskominfo menyediakan sekaligus mengelola sistem aplikasi sebagai sarana integrasi data antar instansi.

Sementara itu, pada dimensi manajemen, pengambilan keputusan strategis dilakukan secara kolektif melalui forum koordinasi lintas OPD. Keputusan yang bersifat teknis-operasional diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sedangkan keputusan yang memiliki dampak luas dikoordinasikan melalui Sekretariat TKPK hingga ke tingkat Wali Kota. Pola manajemen yang adaptif ini, yang merespons dinamika lapangan melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama, mencerminkan implementasi peran administrator yang matang sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Wright (1978).

Fokus Perhatian terhadap Kebijakan (*Focus Attention on the Policy*)

Sebagai indikator penutup dalam kerangka IGR, sinergi antar instansi pemerintah dituntut mampu menghasilkan dampak nyata terhadap pembentukan dan penyesuaian kebijakan publik, khususnya dalam aspek penganggaran dan arah intervensi sebagaimana dikemukakan oleh Wright (1978). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi dalam implementasi PDKTSAM Reborn telah berimplikasi pada kebijakan, meskipun dengan tingkat pengaruh yang berbeda pada masing-masing OPD. Bappeda mengoordinasikan pemetaan anggaran penanggulangan kemiskinan lintas OPD yang dituangkan dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT), didukung oleh pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan mekanisme *tagging* kemiskinan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dinas Sosial P3AP2KB memperoleh tambahan alokasi anggaran sekitar tiga ratus juta untuk mendukung intensifikasi survei lapangan, sementara Diskominfo melakukan penyesuaian prioritas program serta redistribusi sumber daya manusia. Di sisi lain, BPS tidak mengalami perubahan anggaran secara langsung, namun tetap berkontribusi dalam aspek metodologis.

Lebih lanjut, data PDKTSAM Reborn telah dimanfaatkan sebagai rujukan lintas sektor dalam perumusan program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sehingga mampu mengurangi tumpang tindih program

dan meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan. Keselarasan indikator dengan sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menempatkan Kota Malang sebagai salah satu *pilot project* integrasi data di Jawa Timur bersama Surabaya dan Mojokerto. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antar OPD tidak hanya berhenti pada koordinasi administratif, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis data, sejalan dengan prinsip IGR yang menempatkan kolaborasi sebagai instrumen strategis dalam proses kebijakan publik.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi Pemerintah Kota Malang dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial melalui aplikasi PDKTSAM Reborn telah terbangun secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan lima indikator IGR menurut Wright (1978), yang mencakup kejelasan pembagian peran formal antar OPD, Bappeda sebagai koordinator perencanaan, Diskominfo sebagai penyedia dan pengelola sistem, Dinas Sosial P3AP2KB sebagai pelaksana teknis, serta BPS sebagai pembina metodologis yang menjadi fondasi sinergi terstruktur. Interaksi antar pejabat yang intensif dan berbasis kepercayaan kelembagaan sehingga mendorong kesamaan persepsi mengenai urgensi integrasi data. Keberlanjutan komunikasi melalui mekanisme formal, informal, dan digital yang menjaga konsistensi koordinasi lintas OPD. Tata kelola administratif yang kolektif dan adaptif dalam mendukung pengambilan keputusan sesuai kewenangan. Serta dampak nyata terhadap kebijakan, khususnya dalam penganggaran, perencanaan lintas sektor, dan penguatan posisi strategis Kota Malang dalam integrasi data nasional. Lebih lanjut, PDKTSAM Reborn telah bertransformasi dari sistem pendataan dasar menjadi instrumen strategis yang mendukung monitoring, evaluasi, dan kebijakan berbasis geospasial, dengan keberhasilan yang ditopang oleh regulasi yang kuat, komunikasi yang berkualitas, serta komitmen kolektif antar OPD, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti dinamika mobilitas penduduk, keberadaan data yang belum sepenuhnya valid, dan kebutuhan penguatan koordinasi dalam proses transisi menuju integrasi DTSEN secara berkelanjutan.

Saran

Sebagai implikasi dari temuan penelitian, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Malang guna memperkuat sinergi antar OPD dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

1. Memperkuat formalisasi sinergi lintas OPD melalui penyusunan SOP, penetapan indikator kinerja yang terukur, serta penyelenggaraan forum koordinasi rutin yang secara khusus mengevaluasi perkembangan pemutakhiran data PDKTSAM Reborn sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.
2. Menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala bagi petugas pendataan di tingkat kelurahan dan kecamatan yang mencakup teknik verifikasi lapangan, komunikasi dengan responden, serta optimalisasi penggunaan aplikasi PDKTSAM Reborn.
3. Mengembangkan program peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi pengelola sistem yang dilengkapi dengan panduan teknis tertulis dan mekanisme pendampingan guna meminimalkan kesalahan *input* data dan inkonsistensi informasi.
4. Menguatkan peran administrator sistem secara kelembagaan melalui pembentukan unit atau tim khusus yang bertanggung jawab atas interoperabilitas data antar OPD, pemeliharaan sistem, serta kesiapan dalam menghadapi integrasi menuju DTSEN.
5. Menjamin konsistensi pemanfaatan data PDKTSAM Reborn dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memastikan seluruh OPD menggunakan data tersebut sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

- Aprilianto, M. R. (2016). *Hubungan Koordinasi Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bandung*. Universitas Pasundan. <https://repository.unpas.ac.id/9982/2/COVER.pdf>
- Ariansyah, D., Sagita, M., Julia, R. A., & Sarmila, S. (2025). Analisis Faktor Penyebab Ketidakmerataan Penyaluran Bansos kepada Masyarakat Miskin. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), Article 10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15482268>
- Azizah, Y., & Permana, I. (2025). Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 7–7. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.173>
- Hastuti, R., Handayani, R., & Noorrahman, M. F. (2024). Pengaruh Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pudak Setegal Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(4), 868–878.
- Helmawati. (2015). *Sistem informasi manajemen pendidikan agama islam*. PT Remaja Rosdakarya. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/211270/sistem-informasi-manajemen-pendidikan-agama-islam>

- Jazuli, M. J. H., & Eprilianto, D. F. (2024). Intergovernmental Relations Dalam Pengembangan Sektor Kebudayaan Dan Pariwisata Di Kabupaten Trenggalek (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Publika*, 103–118. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p103-118>
- McLeod, R. (2001). *Sistem Informasi Manajemen*. PT Prenhallindo. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/201033/sistem-informasi-manajemen-jilid-1>
- Milakovich, M. (2014). Digital Governance and Collaborative Strategies for Improving Service Quality: *Proceedings of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing*, 109–118. <https://doi.org/10.5220/0005021001090118>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE. <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>
- Milhan, Y. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. *Jurnal Ketransmigrasian*. https://www.academia.edu/2329282/Sinergitas_Instansi_Pemerintah_Dalam_Pembangunan_Kota_Terpada_Mandiri
- Mukarom, Z. (with Mukarom, Z., & Rohman, C. A.). (2020). *Teori-Teori Komunikasi* (A. I. Setiawan, Ed.). Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/31495/>
- Nuryana, & Junaidi. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 356–383. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5266>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Problematika Bantuan Sosial dan DTKS*. <https://ombudsman.go.id/443/artikel/r/pwkinternal--problematika-bantuan-sosial-dan-dtk>
- Palumpun, A. S. (2024). *Proses Pengembangan Inovasi By Need Pada Sistem Informasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)*. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/231174/1/Aris%20Sugiarto%20Palumpun.pdf>
- Pratama, I. P. A. E. (2019). *Sistem Informasi dan Implementasinya: Teori & Konsep Sistem Informasi Disertasi Berbagai Contoh Praktiknya Menggunakan Perangkat Lunak Open Source*. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206156/sistem-informasi-dan-implementasinya-teori-dan-konsep-sistem-informasi-disertai-berbagai-contoh-praktiknya-menggunakan-perangkat-lunak>
- Privy. (2024, Oktober 22). Apa Itu Digital Governance? Kelebihan, Konsep, Tantangan. *Privy Blog*. <https://privy.id/blog/digital-governance/>
- Rakamdani, & Adiinto. (2019). Sinergitas Aktor Dalam Pengembangan Desa Wisata Okura Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), Article 2.
- Santoso, A., Kurniawati, E., & Dhani, A. U. (2023). Kajian Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 17(1), 79–94. <https://doi.org/10.35475/ripte.v17i1.176>
- Smeru Research Institute. (2023). *Kajian Dampak Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan pada Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu | The SMERU Research Institute*. <https://smeru.or.id/id/publication-id/kajian-dampak-bantuan-iuran-program-jaminan-kesehatan-pada-masyarakat-miskin-dan>
- Welchman, L. (2015). *Managing chaos: Digital governance by design*. Rosenfeld Media. <https://archive.org/details/managingchaosdig0000welc>
- Wright, D. S. (1978). *Understanding intergovernmental relations: Public policy and participants' perspectives in local, state, and national governments*. <https://archive.org/details/understandingint00wrig>